GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Kompas** **Tanggal** : **14 Maret 2007**

Subyek : **Ekspor Pasir Ilegal** **Hari** : **Rabu**

Halaman : **23**

TNI AL Bersikap Tegas

Jakarta, Kompas - Semua kapal yang mengangkut pasir laut maupun pasir darat dan barang tambang lain seperti granit dari Provinsi Kepulauan Riau menuju Singapura akan ditindak tegas. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Soebijanto bahkan menyatakan dengan tegas akan menangkapnya.

Kebijakan itu, menurut Slamet, Selasa (13/3), terpaksa dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah akibat aktivitas penambangan dan penjualan pasir darat maupun laut ke Singapura.

"Saya sudah bicara lewat telepon soal ini ke Menteri Negara Lingkungan Hidup. Beliau mendukung. Kerusakan lingkungan akibat penggalian dan penjualan pasir itu sudah sangat parah. Malah ada dua pulau yang sudah hampir hilang," kata Slamet seusai menghadiri pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan XL Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tahun 2007 di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Slamet mengatakan, dalam bertindak, pihaknya berpegang pada aturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Dalam aturan tersebut, TNI AL juga berkewajiban membantu dan terlibat menangani kasus perusakan lingkungan di daerah itu.

Slamet juga menambahkan, kalaupun Singapura tetap ingin mendatangkan pasir atau granit untuk mereklamasi pantai mereka, negara itu seharusnya juga bisa membeli dan mendatangkan pasir dari kawasan lain di Indonesia secara legal.

Diplomasi agresif

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lemhannas Muladi meminta pemerintah berani menerapkan politik diplomasi yang lebih agresif dalam menghadapi sejumlah persoalan di wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia.

Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, tetapi, kata Muladi, pada praktiknya pasif. Hal ini terutama dalam menangani berbagai masalah perbatasan seperti terkait dengan pembalakan liar, pencurian ikan, rebutan Blok Ambalat dengan Malaysia, dan penjualan pasir darat/laut ke Singapura.

Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR menyatakan dukungannya atas kebijakan Menteri Perdagangan melarang ekspor pasir ke Singapura. Atas dasar itu, F-KB juga mendesak Presiden tidak ragu-ragu menindak semua pejabat atau perusahaan yang terlibat. (dwa/sut)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup